

IMPLEMENTASI PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI PENGEMBANGAN SEMANGAT BELA NEGARA MAHASISWA (Studi Deskriptif Di Universitas Pendidikan Indonesia)

Deny Surya Permana
Universitas Banten Jaya
Serang, Indonesia
denybaja@gmail.com

ABSTRACT

This study is back grounded by author's anxiety toward the fading of state defence spirit of citizen included college students. This study use qualitative approach with descriptive method. Data of study is obtained by interview, observation, and documentation study. Result of study reveal that: 1) Lecturer team of Civic Education, MKDU Department develop Syllabus by concerning student's cognitive, affective and psychomotor domain, then this Syllabus is used to become reference to develop Lecturing Program Unit by civic education lecturers; 2) Syllabus and Lecturing Program Unit that have been designed in implementation in class undergo much adjustments; 3) The development of student's state defence spirit is done in learning process by discussing more deeply Indonesia geo politic and geo strategy topics because state defence topic is integrated in those two subject matter. Whereas strategy that is implemented by lecturer is by giving example of state defence behaviour and through the story of nation struggle history that contain nationalism and patriotism value; 4) State defence spirit is done by college student by learning persistently to actualize knowledge potency, active in university student affair organization, have achievement, fortify him/herself from negative foreign culture, and apply Indonesian-ness values in attitude and behaved. Thus, college student's predicate as agent of change, social control, and iron stock can be actualized, because self devote according to his/her profession and predicate as a college students for the sake of nation and state interest included in state defence.

Keywords: Civic Education, Learning Process, State Defence Spirit of Collage Student.

PENDAHULUAN

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini mengalami kemunduran dalam semangat nasionalisme dan patriotisme yang merupakan bagian dari bela negara. Indonesia yang dahulu dikenal dengan bangsa yang ramah, kini lebih dikenal dengan bangsa yang mudah marah sehingga setiap hari kita disuguhkan

berita-berita kerusuhan dimana-mana. Selain itu nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong kini telah terkikis oleh semangat individualisme, masyarakat Indonesia yang dahulu dikenal suka menolong sekarang dinilai sudah tidak memiliki kepekaan lagi untuk saling membantu. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Litbang Kompas edisi 24

Mei 2010 yang menanyakan kuat atau lemahkah semangat nasionalisme bangsa

Indonesia saat ini, sebagian besar responden yaitu 60,7 % menyatakan semangat nasionalisme bangsa Indonesia saat ini adalah lemah. Faktor-faktor yang menjadi ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia tersebut adalah globalisasi, luntarnya budaya/tradisi lokal, semangat individualisme, ketidakpercayaan terhadap para pemimpin bangsa, dan konflik antar elit politik. (Kompas, 2010).

Kondisi tersebut tentu saja mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana diketahui bahwa usaha untuk menjaga keutuhan NKRI dilakukan dengan cara sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara. Sebagaimana terdapat dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dalam pasal tersebut ketentuan bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara, sebagai bentuk partisipasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

Sebagaimana dikemukakan Suratman (2008:1) bahwa “Ketika dipandang dari sisi hak, upaya itu terbuka bagi prakarsa yang bersifat sukarela dari warga negara, siapapun mereka. Manakala dipandang dari

sisi kewajiban, ia terbuka bagi proses pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah jika kondisi memungkinkan”. Artinya jika negara dalam kondisi normal/tidak berperang maka bela negara dilakukan oleh warga negara sebagai kekuatan pendukung, sedangkan kekuatan utama dalam pertahanan keamanan negara diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kepolisian.

Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara tentu saja memiliki hak dan kewajiban dalam usaha bela negara. Usaha bela negara yang dilakukan oleh warga negara/mahasiswa tidak selalu dalam bentuk memanggul senjata (berperang) akan tetapi usaha bela negara pada masa sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengembangkan sikap kecintaan terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu bela negara dapat diartikan secara fisik dan non fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non fisik dapat didefenisikan sebagai segala upaya dalam mempertahankan negara melalui peningkatan rasa nasionalisme.

Usaha bela negara tersebut secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana terdapat dalam pasal 9 ayat

(1) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Ayat (2) “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (d) pengabdian sesuai profesi”.

Dari klausul tersebut, salah satu upaya penyelenggaraan bela negara dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu untuk memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan, maka pemerintah mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan pada setiap satuan pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Jika dikaji lebih jauh maka pemerintah melalui undang-undang tersebut memiliki tujuan menyiapkan generasi muda/mahasiswa agar memiliki semangat

bela negara, karena mahasiswa merupakan kader bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Branson (1999:1) bahwa “masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Karena menurut Branson (1999:3) “tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggungjawab, efektif dan terdidik”. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda/mahasiswa yang memiliki semangat bela negara dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi pengembangan semangat bela negara mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Bogdan (1982:5) mengungkapkan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Sebagaimana dikemukakan Nazir (2005:63) bahwa metode deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau ukuran secara sistematis serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (1992:16-18) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan/verifikasi*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan terungkap bahwa Silabus disusun oleh tim dosen Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), dan pembuatan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dikembangkan oleh masing-masing dosen. Sebagaimana diketahui bahwa Jurusan

Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang berada di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) memiliki beberapa mata kuliah yang dibina, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Teknologi (PLSBT).

Sedangkan dari hasil studi dokumentasi terungkap bahwa ada beberapa metode yang digunakan dan dirancang dalam SAP, yaitu metode ekspositori, tanya jawab, ceramah, presentasi, diskusi kelompok, observasi, studi kasus, dan *problem solving*. Metode ceramah merupakan metode yang paling dominan digunakan oleh dosen dalam menyusun SAP. Sedangkan media yang dipakai sebagaimana dirancang dalam SAP adalah presentasi *power point* dengan menggunakan LCD dan video.

Untuk sumber pembelajaran selain menggunakan buku teks dan modul, dalam SAP juga dirancang menggunakan sumber pembelajaran lain seperti fenomena politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang terjadi di masyarakat. Selain itu sumber dari media massa, baik cetak dan elektronik (internet) dan hasil studi lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Berdasarkan studi dokumentasi, terungkap juga bahwa dosen merancang evaluasi dalam SAP dengan berbagai cara, antara lain dengan pengumpulan tugas individu, tugas kelompok, makalah hasil observasi, *quiz* yang dilakukan diakhir proses pembelajaran, *klipping*, test yang terdiri dari UTS, dan UAS, dan *book report/chapter report*.

Berdasarkan temuan tersebut, jika dikaji secara teoritis Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan dua istilah, yaitu *civic education* dan *citizenship education*. *Civic education* bagi Cogan (1994:4) "...refers generally to the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure".

Dalam posisi ini *civic education* diperlakukan sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult live". Maksudnya adalah *civic education* ini merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* dipandang sebagai "...the more inclusive term and encompasses both these in school experiences as well as out of

school or nonformal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media ect, which help to shape the totality citizenship". Artinya *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar disekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu oleh Cogan (1999:5) disimpulkan bahwa "...education for citizenship is the larger overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one's development as citizens". Dengan kata lain *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan suatu konsep yang lebih luas dimana *civic education* termasuk bagian penting didalamnya. (dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 11)

Perbedaan konsep *civic education* dan *citizenship education* tersebut tentu saja mempengaruhi cara pengorganisasian kurikulumnya. Cara pengorganisasian *citizenship education* dalam kurikulum dapat menggunakan pendekatan *separated*, *integrated*, dan *cross-curricular* sebagaimana dikemukakan (Winataputra dan Budimansyah, 2007).

Dalam pendekatan *separated*, *citizenship education* diajarkan sebagai suatu mata pelajaran/kuliah atau suatu aspek. Sedangkan dalam pendekatan *integrated*, *citizenship education* diajarkan sebagai suatu bagian dari suatu mata pelajaran/kuliah terpadu "*social sciences*" atau "*social studies*", atau dikaitkan dengan mata pelajaran/kuliah lain. Sementara itu dalam pendekatan *cross-curricular*, *citizenship education* tidak secara khusus dalam suatu mata pelajaran atau suatu topik, melainkan secara sistemik dimasukan kedalam keseluruhan tatanan kurikulum dengan memasukannya kedalam mata pelajaran/kuliah yang ada.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah melibatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Mahasiswa melakukan observasi terhadap pengamen, pedagang kaki lima, dan komunitas lainnya. Kemudian hasil observasi tersebut dipresentasikan di dalam kelas sebagai bahan pembelajaran. Sumber belajar pada hakikatnya terdapat di mana-mana, seperti di kampus, di rumah, di pusat kota dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut tergantung pada kreatifitas pendidik, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan Winataputra (1991:165) berpendapat bahwa

setidaknya terdapat lima macam sumber belajar, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, lingkungan (lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan masyarakat), dan media pendidikan.

Penggunaan masyarakat sebagai sumber belajar yang dilakukan dalam bentuk penelitian kecil (observasi) yang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan Chamberlin (1943); Joyce, Calhoun, dan Hopkins (1999) bahwa investigasi kelompok telah diterapkan pada semua bidang pelajaran/mata kuliah, pada peserta didik disemua tingkatan umur, dan bahkan digunakan sebagai model pengajaran sosial yang paling inti. Model ini dapat mengembangkan kompetensi sosial mahasiswa sekaligus untuk membina mahasiswa dalam memperjelas masalah, menelusuri berbagai perspektif dalam masalah tersebut, dan mengkaji bersama untuk menguasai informasi, gagasan, dan kemampuan yang simultan. Kemudian Sharan, dkk (1998), Joyce dan Calhoun (1998) mengkombinasikannya dengan penemuan-penemuan terbaru dalam kelompok penelitian.

Sekaitan dengan hal tersebut metode pembelajaran kekinian yang sering digunakan oleh pendidik baik di

persekolahan dan perguruan tinggi adalah dengan menggunakan metode portofolio.

Istilah portofolio yang paling sering dikenal terdapat di lapangan pemerintahan, terutama ketika menunjuk pada menteri yang tidak membawahi suatu departemen, biasanya menteri seperti itu disebut menteri negara atau *minister without portofolio*, akan tetapi di dunia pendidikan istilah itu sangat berbeda dan masih relatif baru. Dalam konteks pendidikan, pengertian portofolio menurut Budimansyah (2002) bisa diartikan sebagai wujud benda fisik yaitu bundel yakni sekumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik, seperti bundelan *pre test*, tugas *post test*, dan lain-lain. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan sosial pedagogis yaitu *collection of learning experience* yang terdapat dalam pikiran peserta didik baik yang berwujud pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.

Sedangkan menurut Winataputra (2002) portofolio adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis melukiskan proses berfikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, sehingga secara utuh melukiskan "*integrated learning experiences*" atau pengalaman belajar terpadu yang dialami oleh mahasiswa dalam kelas sebagai satu kesatuan.

Dengan penggunaan model pembelajaran portofolio, mahasiswa dapat

lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Sehingga metode ceramah yang dominan digunakan oleh dosen dapat dikurangi. Tujuan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pun akan tercapai. Dosen hanya bertugas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan temuan penelitian, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas, dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Jika merujuk kepada pendapat Kerr (1999), maka Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia termasuk dalam kategori minimal dengan indikator *thin, exclusive, elitist, civic education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*. Maksudnya adalah didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarga-negaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitik beratkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Sedangkan yang bersifat maksimal ditandai oleh *thick., inclusive, activist, citizenship education, participative, process-led, valued based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*. Maksudnya adalah didefinisikan

secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, diberi label *citizenship education*, menitikberatkan pada partisipasi peserta didik melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, dan hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian multidisiplin dengan dua tugas. *Pertama*, tugas membangun batang tubuh ilmu pengetahuan (*body of knowledge*) yang dapat dikategorikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang telaah; dan *kedua*, tugas membangun karakter warga negara sebagai bidang pengembangan. Bidang telaah Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan tugas mengkaji dan meneliti aspek materi (*content*) Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memperkuat bangunan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang pengembangan terkait dengan upaya dan kegiatan tentang bagaimana mentransformasikan dan atau mewariskan konsep, nilai-nilai, moral, norma dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (Sapriya, 2007)

Lebih lanjut, Sapriya (2007) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural mencakup kegiatan untuk penanaman wawasan kebangsaan, sosial politik, bela negara, patriotisme, serta perbaikan nilai dan moral warga negara melalui berbagai organisasi kemasyarakatan yang disusun secara sistematis dan komprehensif dengan sasaran semua warga negara yang dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Lebih lanjut Sapriya menyatakan bahwa kesadaran manusia Indonesia terhadap negaranya, nusantaranya merupakan ontologi karena merupakan kekayaan meskipun tidak begitu tampak tapi ada. Ontologi berupa kesadaran sebagai bangsa Indonesia ini muncul dan terjadi setelah melalui proses pengalaman sejarah yang panjang. Kesadaran yang berupa semangat nasionalisme (*nationalism spirit*) inilah yang terus menerus ditransformasikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mencetak generasi yang memiliki semangat bela negara. Karena jika kesadaran manusia Indonesia terhadap negara merupakan ontologi Pendidikan Kewarganegaraan, maka materi-materi Pendidikan

Kewarganegaraan harus mampu mencetak generasi muda memiliki semangat bela negara sebagaimana tuntutan ontologinya. Sebagaimana dikemukakan Sumantri (2008) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membawa generasi muda untuk berproses sehingga memiliki kecerdasan, kemampuan, dan memiliki semangat kebangsaan.

Bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan negara dapat diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana dikemukakan Winarno (2009:186) bahwa bela negara dapat dilakukan sepanjang masa dalam segala situasi misalnya dengan cara: a) meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak; b) menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat; c) berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dalam berkarya nyata (bukan retorika); d) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan e) pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah SWT, memulai ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Tampaknya, tantangan globalisasi mengancam bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kelangsungan serta perkembangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Tantangan-tantangan bangsa Indonesia di masa depan harus diantisipasi dan diatasi dengan pembangunan generasi penerus agar mencapai keunggulan, karena kompetisi ataupun perang dimasa depan akan banyak ditentukan oleh keunggulan otak dan keuletan serta ketahanan bangsa. Bangsa lain pun juga juga mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu mencetak generasi mudanya memiliki semangat bela negara yang kuat sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi, tidak

malah sebaliknya terkikis oleh pengaruh negatif globalisasi.

Selain itu yang dibutuhkan mahasiswa saat ini adalah figur yang dapat dijadikan teladan. Baik itu para pejabat publik, orang tua di rumah, maupun dosen dikampus harus dapat dijadikan contoh yang baik oleh mahasiswa. Akan tetapi pada sekarang ini, hanya sebagian kecil saja orang-orang yang dapat dijadikan teladan. Sebagian besar pejabat publik merupakan contoh yang buruk bagi mahasiswa, budaya korupsi, nepotisme, dan kolusi sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Tentu saja hal tersebut contoh yang buruk. Mahasiswa membutuhkan figur yang cerdas, jujur, berani, pekerja keras, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat sebagaimana para pendiri negara kita, yaitu Soekarno dan Hatta. Hal tersebut penting untuk membentuk mahasiswa sehingga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Tidak hanya mahasiswa saja yang mengalami krisis kepercayaan, akan tetapi rakyat Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Sebagaimana dikemukakan Sapriya (2007) bahwa krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah sebagai bagian dari krisis multidimensional karena menurunnya sikap keteladanan dari para pemimpin.

Dari pemikiran inilah bangsa Indonesia perlu belajar kembali dari sosok/figur para *the founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun ada perbedaan prinsipil dalam pemikiran politik, dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta tetap harmonis sebagai tokoh nasional dalam berjuang bahkan dalam kehidupan keluarga. Mereka berjuang melalui pikiran baik lisan maupun tulisan bahkan berdebat, beradu argumentasi semata-mata untuk kemerdekaan, eksistensi, dan kejayaan NKRI. Kecintaan mereka terhadap rakyat, bangsa dan negara tidak diragukan lagi sekalipun mereka harus mengorbankan kepentingan pribadi. Kita diajak berbangga untuk dapat tampil sebagai bangsa Indonesia dan dirintislah rasa kebangsaan.

Figur yang dapat dijadikan contoh mahasiswa di lingkungan kampus adalah para pejabat kampus yang terdiri dari Rektor, Dekan dan yang lainnya, kemudian dosen, dan mahasiswa senior. Dosen sebagai pejabat fungsional adalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pengembangan semangat bela negara mahasiswa karena keterkaitannya dengan mahasiswa secara intens. Oleh karena itu pula, dosen harus dapat memfungsikan dirinya sebagai pendidik, dan bukan hanya sebagai pelaksana mentransformasikan ilmu pengetahuan saja. Dosen harus dapat

menampilkan roh pendidikan dan pencerahan. Selain itu figur mahasiswa senior yang memiliki reputasi yang baik perlu memfungsikan dirinya untuk menjadi teladan dalam membimbing mahasiswa junior secara arif dan bijak tanpa mengubah statusnya sebagai mahasiswa biasa yang setara dengan mahasiswa lainnya.

Fungsi para pejabat kampus, dosen, dan mahasiswa tersebut harus sinergis dan saling mendukung sesuai dengan porporsinya. Figur pejabat kampus, dosen, dan mahasiswa senior memiliki fungsi sebagai teladan, sebagai motivator dan dinamisator, sebagai fasilitator, sebagai edukator dan konselor.

Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda telah mampu menorehkan sejarah yang cemerlang dalam perjalanan sejarah hidup bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Field (1971) menyebut pemuda sebagai komunitas kecil yang memiliki kekuatan untuk merubah sejarah, karena perubahan sejarah selalu dimulai dari kelompok kecil. Mereka bisa dikategorikan sebagai kekuatan *minority profetic* yaitu kekuatan kecil yang bertindak seperti seorang "nabi" untuk merubah kondisi sosial kemasyarakatan. Sejumlah predikat melekat dalam setiap diri mahasiswa, *agent of social change*, *social*

control dan *moral force*. Perdiklat tersebut seharusnya dijadikan motivasi oleh mahasiswa untuk terus membina dirinya sehingga menjadi manusia unggul dan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah mencatat bahwa peran pemuda dan mahasiswa dalam kehidupan berbangsa sangat besar sekali, dimulai dengan kelahiran Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai generasi perintis, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai generasi penegas, dan perlawanan yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa terhadap penjajah sebagai generasi pendobrak sehingga berbuah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Perjuangan mahasiswa dalam menorehkan sejarah pun terus berlanjut dengan moment 1966 pada masa orde baru, dan masih segar dalam ingatan kita peran besar mahasiswa dalam pergantian jaman dari orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998. Akan tetapi, eksistensi mahasiswa sekarang harus dipertegas lagi, jangan sampai mahasiswa menjadi lemah dan tergerus oleh dampak negatif globalisasi.

Mahasiswa harus berada pada barisan paling depan dalam upaya membela negara, baik secara fisik ketika keadaan negara

berperang maupun non fisik ketika situasi damai. Karena mahasiswa secara fisik memiliki keunggulan dibandingkan dengan kaum tua atau anak-anak, dan secara intelektual memiliki keunggulan karena setiap hari bergaul dalam lingkungan akademis.

Kedua potensi itu harus terus dikembangkan oleh mahasiswa, dan pemerintah melalui perguruan tinggi harus terus mengkader mahasiswa sebagai kader-kader bangsa. Karena pengembangan semangat bela negara tidaklah cukup dimulai dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, tetapi harus dilanjutkan dengan proses yang terus-menerus. Proses membangun semangat bela negara mahasiswa dari semangat bela negara yang lemah menjadi kuat tidaklah mudah dan tentu memerlukan waktu. Untuk itu diperlukan transformasi semangat bela negara terus menerus dan berlanjut. Jika berpatokan pada hal tersebut, maka terlihat bahwa Peran Pendidikan Kewarganegaraan sangat besar dan strategis.

KESIMPULAN

Keikutsertaan warga negara dalam bela negara salah satunya diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan materi yang wajib diberikan

pada satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sekarang ini merupakan pembaharuan dari Pendidikan Kewiraan yang dulu lebih cenderung menitik beratkan pada pembentukan bela negara mahasiswa dengan cara-cara yang indoktrinatif dan pengajarannya dilakukan secara militeristik. Akan tetapi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat tatanan demokrasi sehingga tercipta masyarakat sipil yang kuat, maka Pendidikan Kewiraan direvisi dan digantikan oleh Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru.

Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru dibangun atas dasar paradigma Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler, teoritik dan programatik serta mengandung target pencapaian pada peserta didik sesuai dengan apa yang termaktub dalam visi, misi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*), dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*), serta dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*). Selain itu pengajarannya harus dilakukan secara demokratis dengan menyentuh domain *kognitif*, *efektif*, dan *psikomotor* mahasiswa yang harus dilakukan secara

holistik dan komprehensif termasuk dalam pengembangan semangat bela negara mahasiswa.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia dirancang untuk menumbuhkan semangat bela negara mahasiswa. Sebagaimana terdapat dalam Silabus Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat materi bela negara walaupun tidak terwujud dalam materi tersendiri, akan tetapi terintegrasi dalam materi geostrategi dan geopolitik Indonesia. Dalam pengembangannya, dosen hanya melakukannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, strategi dan konsep pengembangan bela negara secara holistik dan komprehensif baru dalam tahap rancangan.

Pengembangan semangat bela negara mahasiswa penting dilakukan mengingat sekarang ini telah terjadi pergeseran peran dan fungsi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki predikat *agent of social change, social control* dan *moral force* sekarang ini justru malah tergerus oleh efek negatif globalisasi. Perubahan gaya hidup, cara berpakaian, dan pergeseran budaya menjadi cermin bahwa bela negara mahasiswa terhadap nilai-nilai ke-Indonesiaan menjadi berkurang.

Perilaku yang dapat ditunjukkan mahasiswa sebagai wujud semangat bela negara adalah dengan belajar yang tekun, dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Hal tersebut sesuai peran dan fungsinya sebagai mahasiswa, karena bela negara dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesinya demi kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan secara khusus peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, tim dosen Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan MKDU mengembangkan Silabus dengan memperhatikan domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian Silabus tersebut dijadikan acuan untuk mengembangkan Satuan Acara Perkuliahan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan.

Kedua, Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan yang telah dirancang dalam implementasi di kelas banyak mengalami penyesuaian. Satuan Acara perkuliahan dirancang menggunakan multi metode dan multi media, akan tetapi dalam implementasinya metode yang dominan digunakan adalah ceramah, diskusi, dan presentasi. Sedangkan media yang digunakan hanya *slide power point*, sehingga proses

pembelajaran masih berpusat pada dosen.

Ketiga, pengembangan semangat bela negara mahasiswa dilakukan dalam proses pembelajaran dengan membahas lebih dalam materi geopolitik dan geostrategi Indonesia karena materi bela negara terintegrasi dalam dua pokok materi tersebut. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh dosen dengan memberikan contoh perilaku bela negara dan melalui cerita sejarah perjuangan bangsa yang mengandung nilai nasionalisme dan patriotisme.

Keempat, semangat bela negara dilakukan mahasiswa dengan cara belajar yang tekun untuk mengaktualkan potensi pengetahuan, aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, berprestasi, membentengi diri dari budaya asing yang negatif, dan menerapkan nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam bersikap dan berperilaku. Dengan demikian predikat mahasiswa sebagai *agent of change*, *social control*, dan *iron stock* dapat mengaktual, karena mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan predikatnya sebagai seorang mahasiswa untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982) *Qualitatif Research for Education, An Introduction to Theory and Methode*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.
- Branson, MS.. (1999). *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th Century*. Washington: CCE.
- Budimansyah, Dasim. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Joyce, dkk. (2009). *Models Of Teaching*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kerr, David. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumantri, Endang. (2008). *Seabad Kebangkitan Nasional Revitalisasi dan Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru yang Adil dan Sejahtera: Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*. Jakarta: CV. Yasindo Multi Aspek.
- Sumantri, Endang. (2008). *An Outline Of Citizenship And Moral Education In Major Countries Of Southeast Java*. Bandung: Bintang Warli Artika
- Sapriya. (2006). *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam*

- Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis PKN dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi SPs UPI: tidak diterbitkan.
- Suratman, Tono. (2008). *Patriotisme Semangat Bela Negara*. Bogor: Lembaga Pengkajian Budaya Nusantara (LPKN).
- Wahab, A.A dan Sapriya. (2011) *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Winataputra, U.S. & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.
- Winataputra, U.S. (2002). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
- Winarno. (2009). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Litbang Kompas. (2010). *Elite Diharapkan Fokus Pada Arah Bangsa*. Kompas, 24 Mei 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.